



Komisaris, Direksi, Staff dan Karyawan
PT. BP. Kedaulatan Rakyat

152th
1831-2023
Sih Kinasih
Ing Sesami

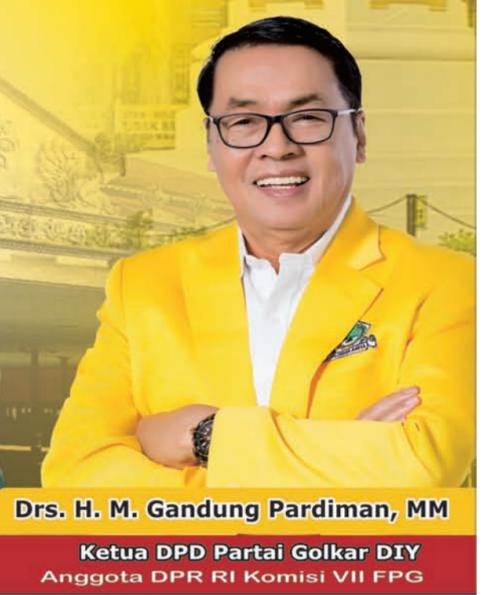
DIRGAHAYU
KABUPATEN
GUNUNGKIDUL




DIRGAHAYU
KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

152th
1831-2023
Sih Kinasih
Ing Sesami

KETUA GERAKAN
PRO PENETAPAN
BERANI BERKORBAN,
JUJUR, PEDULI SEMUA
Mari kita berlomba lomba dalam kebaikan

Syarief Guska Laksana SH
Ketua PD AMPG DIY
Ketua Yayasan GPC

Drs. H. M. Gandung Pardiman, MM
Ketua DPD Partai Golkar DIY
Anggota DPR RI Komisi VII FPG

MODERASI BERAGAMA

Kerukunan Tidak Otomatis, Harus Diikhtiarkan

PENGASIH (KR) - Moderasi beragama akan menumbuhkan semangat untuk menjaga kerukunan umat. Oleh karena itu sesungguhnya kerukunan itu bukan hadir secara otomatis, namun harus diikhtiarkan.

"Moderasi beragama ini merupakan hubungan umat beragama yang saling menghormati, toleransi, saling pengertian dalam bingkai NKRI. Kerukunan itu tidak terbentuk secara otomatis, tapi harus kita upayakan, yakni melalui pemahaman keberagaman yang moderat," kata Kepala Kankemenag Kulonprogo HM Wahib Jamil SAg MPd dalam sambutannya pada Focus Group Discussion (FGD) Lintas Sektoral Penguatan Moderasi Beragama, di Ruang AVA MAN 1 Kulonprogo, Kamis (25/5).

Menurut Jamil saat ini ada 3 tantangan besar yang dihadapi oleh umat beragama di Indonesia termasuk di

Kulonprogo. Yakni pertama, berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrem), serta mengesampingkan martabat kemanusiaan. Kedua, berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas fungsi agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik.

"Kemudian ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Untuk itulah moderasi beragama menjadi sangat penting, dengan indikator adanya komitmen kebangsaan (aman NKRI), sikap toleransi, anti kekerasan baik verbal maupun nonverbal, serta menghormati budaya dan tradisi. Sehingga tidak dibenarkan membenturkan budaya dan tradisi, agama dan budaya, serta agama dan negara," tutur Jamil.

Pemkab Kulonprogo, diuraikan

oleh Restu Dewandaru Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda setempat, mendukung penuh terciptanya kerukunan umat beragama. Salah satu bentuk dukungan itu dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.

"Memang imbas dari adanya berbagai pembangunan di Kulonprogo salah satunya munculkan potensi ketidakrukunan di masyarakat. Sehingga ada potensi munculnya berbagai konflik, namun hal itu dapat diatasi dengan baik. Pemkab terus berupaya meredam konflik-konflik yang terjadi. Adapun upaya yang ditempuh melalui penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Selain itu juga mengupayakan peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial," terang Restu. (Wid)-f

PERBEDAAN HONOR MASIH MENJADI PR

6.562 Linmas Bantul Siap Amankan Pemilu

BANTUL (KR) - Dalam menghadapi Pemilu 2024, Satpol PP Kabupaten Bantul mempersiapkan personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan kegiatan peningkatan kapasitas anggota Linmas Kalurahan di Kabupaten Bantul.

Kabid Linmas Satpol PP Bantul, Joko Wintolo, Kamis (25/5), mengatakan jumlah Linmas di seluruh Bantul ada 6.562 personel tersebar di 75 kalurahan. "Setiap RT minimal ada 1 Linmas, ada juga yang 1 RT mempunyai lebih dari 1 Linmas, tetapi idealnya satu RT ada 1 Linmasnya," ungkapnya.

Hanya saja, yang menjadi kendala dan belum ada pemecahannya, yakni terkait perbedaan honor bagi petugas Linmas.



KR-Judiman

Kegiatan peningkatan kapasitas Satlinmas Bantul menghadapi Pemilu 2024.

Keberadaan Satlinmas di Kalurahan, Lurah sebagai ketua dan Jagabaya sebagai ketua pelaksana. Sehingga dalam koordinasi Satlinmas di Satpol PP kemarin yang diundang semua Jagabaya Kalurahan dan masing-masing wilayah Eks Pembantu Bupati diwakili 2 personel.

Mengacu pada Permenagri No 10 Tahun 2009, tentang penugasan Satlin-

mas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban serta keamanan penyelenggaraan Pemilu, pemberian honor Satlinmas yang bertugas di TPS memperoleh honor sebesar Rp 700.000, sedangkan petugas Linmas yang menjaga keamanan di Kalurahan maupun di Kapanewon masing-masing cuma Rp 100.000. (Jdm)-f

LESPK - KAHMI GELAR SEMINAR

Menakar Cawapres dan Pemilu 2024

YOGYA (KR) - Kampus sebagai bagian dari pencerdasan berbangsa dan bernegara jangan sampai kehilangan akar ke masyarakat dan terus ikut serta aktif memberikan kontribusi kepada publik dan penyelenggara pemerintahan. Karenanya, kampus diharapkan dapat memberi makna pada pendewasaan demokrasi terutama dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2024.

"Kearifan lokal dan ke-timuran kita seperti gotong royong seyogyanya dijadikan modal dasar untuk membangun jiwa dan raga bangsa," ujar Suhartono SE MSi, selaku Wakil Ketua III Bidang Kemaha-



KR-Abrar

Panitia penyelenggara seminar 'Menakar Cawapres dan Pemilu 2024' saat berada di Redaksi KR, Rabu (24/5).

siswaan STIE WW sekaligus Koordinator Presidium MW KAHMI DIY dalam silaturahmi dengan Humas Redaksi KR Suci Aryadhien di ruang Redaksi KR, Jalan Margo Utomo, 40-46 Yogya, Rabu (24/5).

Saat silaturahmi, Su-

hartono didampingi Khamim ZP (Ketua Penasehat KAHMI), Syamsudin (Sekretaris KAHMI), Muhari (Wakil Sekretaris KAHMI), Wahyudi (LeSPK), In'am Mustofa (Direktur LeSPK) dan Khoirul Wafa (LeSPK). Menurut Suhartono, tu-

juan pihaknya bersama rombongan silaturahmi dengan KR, terkait dengan akan digelarnya seminar bertajuk 'Menakar Cawapres dan Pemilu 2024'. Kegiatan seminar yang akan diadakan Lembaga Studi Pendidikan dan Kebangsaan (LeSPK) Yogyakarta dan Korp Alumni HMI (KAHMI) DIY tersebut digelar di Kampus STIE Widya Wihawa Jalan Lowanu UH VI/20, Sorosutan, Umbulharjo, Yogya, Sabtu (27/5) pukul 08.00 hingga pukul 12.00. Narasumber Chusnul Mar'iyah PhD, Ahmad Dolly Kurnia SSi MT, Dr Hanta Yudha, Fami Fahrudin MBA dan Dr Fadjar Nursahid. (Rar)-f

AKHIR BULAN MEI TERPILIH 3 BESAR

28 Peserta Lelang Jabatan Jalani Uji Gagasan

WONOSARI (KR) - Sebanyak 28 peserta lelang jabatan yang sudah lolos seleksi administrasi kini sudah selesai mengikuti uji kompetensi di UPT Balai Pengukuran Kinerja Pegawai BKD Yogyakarta. Saat ini peserta sedang tes penulisan makalah, uji gagasan, wawancara, penelusuran rekam jejak hingga pada akhir bulan, tepatnya tanggal 30 Mei akan mengikuti tes kesehatan. "Targetnya akhir bulan ini sudah dapat terpilih 3 besar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selanjutnya dilaporkan ke Bupati Gunungkidul," kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul Iskandar SIP MPA, Jumat (26/5).

Sebelum uji gagasan peserta terbagi menjadi tiga kelompok menjalani uji kompetensi. Hari pertama 10 peserta, dilanjutkan hari kedua dan ketiga masing-masing 9 peserta. Uji kompetensi untuk mengetahui kemampuan managerial, sosio kultural yang merupakan satu rangkaian proses seleksi sehingga uji kompetensi

merupakan satu paket untuk uji gagasan dan penulisan naskah. Semua peserta uji kompetensi mengikuti tes selanjutnya sampai uji kesehatan. Sebagaimana diketahui 28 peserta ini akan memperebutkan lima formasi jabatan kepala OPD. Adapun lima formasi yang dilelang, masing-masing, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang pejabat sebelumnya Sri Suhartanta SIP MSi promosi menjadi Sekda. Kepala Dinas Pariwisata, pejabatnya M Arif Aldian SIP MSi rotasi menjadi Kepala Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pejabatnya Drs Wahyu Nugroho MSI rotasi menjadi staf ahli bupati, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) Winarya SH MSi purna tugas dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) pejabatnya Ir Irawan Jatmika MSi sudah lama rotasi menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Terpadu (DPUPRKP). (Ewi)-f